

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT MELALUI PERSPEKTIF FIQH DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Burhanuddin S., SHI., M.Hum

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim

Email: burhanuddins.uin@gmail.com

Abstrak

Pendistribusian zakat pasti memberikan manfaat bagi para mustahiq. Namun pendistribusian zakat dikatakan berhasil apabila efek pendistribusiannya mampu merubah keadaan dari status mustahiq menjadi muzakki. Agar dapat merubah keadaan mustahiq, program pendistribusian zakat perlu dikembangkan dari mulai dari penyaluran zakat yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok kemudian dilanjutkan ke penyaluran yang bersifat produktif untuk merintis/ mengembangkan usaha mandiri. Agar tidak menyalahi prinsip syariah, pengembangan program pendistribusian perlu didasarkan pada dalil-dalil baik dari segi kaidah kebahasaan (al-qowâid al-lughawiyah) maupun pendekatan tujuan syariat (maqâshid asy-syari'ah). Bahkan untuk menjamin kepastian hukum dari aspek prosedural, peraturan perundang-undangan juga harus mendapat perhatian.

Kata Kunci: *Fiqh, Pendistribusian, Zakat*

Kenyataan bahwa tantangan yang sering dialami oleh Badan/ Lembaga Amil Zakat adalah bagaimana mendapatkan sumber zakat dari para *muzakki* secara berkelanjutan (stabil). Apabila suatu Badan/ Lembaga Amil Zakat telah mampu mengatasi tantangan tersebut, berarti kelembagaannya akan bisa bertahan bahkan berkembang. Begitupula sebaliknya, apabila tantangan tersebut tidak mampu diatasi, maka peluang akan beralih ke Badan/ Lembaga Amil Zakat lainnya yang lebih mendapatkan kepercayaan dari para *muzakki*.

Kunci dari perolehan sumber zakat adalah pada kepercayaan *muzakki*. Kepercayaan kepada Badan/ Lembaga Amil Zakat tertentu dapat terwujud, setelah adanya kesadaran masyarakat untuk menjadi *muzakki*. Kesadaran untuk menjadi *muzakki* dapat tumbuh seiring dengan kesadaran untuk menjalankan syariat Allah terutama bidang zakat. Tahapan inilah yang barangkali mempengaruhi hasil

penghimpunan dana zakat di berbagai Badan/ Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia.

Bentuk harta/ penghasilan yang wajib dikenai zakat semakin bertambah seiring berkembangannya profesi para *muzakki*. Meskipun zakat wajib dipungut terhadap harta yang telah mencapai *nishāb*, namun syarat *haul* hanya berlaku terhadap harta tertentu. Sayyid Sabiq menyatakan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta milik kaum muslim merdeka yang telah memenuhi syarat *nishāb*.¹ Salah satu syarat *nishāb* adalah harta yang telah mencapai satu tahun (*haul*).² Sayyid Sabiq mengutip pendapat Nawawi yang menyatakan bahwa mazhab kami, Maliki, Ahmad Ibn Hambal, dan Jumbuh menyaratkan *haul* terhadap harta benda (misalnya emas, perak, ternak) yang wajib dizakati. Namun apabila tidak mencukupi *nishāb* pada saat tahun tersebut, maka gugurlah *haul*.³ Sedangkan zakat pertanian dan buah-buahan kewajiban zakatnya setiap kali panen.⁴ Allah berfirman:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ

Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin) (QS. Al-Anam[6]: 141)

Keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya ditentukan oleh keberhasilan pengumpulan/ penghimpunan dana yang selalu meningkat dari waktu ke waktu, melainkan juga sangat ditentukan dari pendistribusiannya. Zakat yang didistribusikan pasti memberikan manfaat bagi *muzakki*. Namun keberhasilan pengelolaan zakat bukan hanya sekedar memberikan manfaat, melainkan bagaimana mampu merubah keadaan seseorang dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*. Dengan menjadikan seseorang sebagai *muzakki*, berarti pengelola zakat telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk menjalankan syariat zakat sebagai bagian dari rukun Islam.

Model pendistribusian zakat, selama ini sangat mempengaruhi kepercayaan *muzakki* untuk menyalurkan atau tidak menyalurkan dana zakat di Badan/ Lembaga Amil Zakat tertentu. Karena itu mengembangkan model pendistribusian yang dapat melahirkan kepercayaan *muzakki* sangatlah penting. Model penyaluran zakat antara satu lembaga dengan lembaga lainnya selain ada persamaan juga ada perbedaan. Persamaan banyak dijumpai dalam model pendistribusian yang bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pokok *mustahiq*, sedangkan perbedaan banyak dijumpai dalam model pendistribusian yang bersifat produktif untuk pemberdayaan usaha

1 Makna *nishāb* secara syara' adalah nisbah (bagian) yang ditetapkan *asy-Syari'* sebagai tanda kewajiban zakat, seperti uang dan selainnya. Perbedaan ukuran *nishāb* ditentukan oleh perbedaan harta *muzakki*. Lihat, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Kitāb al-Ilmiyah, 1424H), I/ 539

2 Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t.), I/ 241

3 *Ibid.* Haul disini adalah haul qomariyah bukan syamsiyah. Satu tahun qomariyah adalah 354 hari, sedangkan tahun hijriyah 365 hari.

4 *Ibid.*

mustahiq. Karena itu memahami model pendistribusian zakat melalui perspektif syariat adalah sangat penting, disamping peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Fiqh Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat (*mashârif al-zakât*) adalah pembagian zakat kepada yang berhak menerimanya (*al-mustahaqûn laha*).⁵ Untuk mendistribusikan zakat secara baik, diperlukan pemahaman (*fiqh*) tersendiri yang didasarkan pada dalil-dalil yang terdapat pada nash-nash syariat yang digali melalui pendekatan kebahasaan (*al-qowâid al-lughawiyah*) maupun pendekatan tujuan syariat (*maqâshid asy-syarî'ah*).⁶ Menurut penulis kedua pendekatan itu merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin terpisahkan, sehingga nash-nash syariat tidak mungkin bertentangan kehendak *asy-Syârî'*, sebagaimana tujuan syariat (*maqâshid asy-syarî'ah*) yang tidak mungkin bertentangan dengan nash-nash syariat.

Pendekatan kaidah kebahasaan digunakan untuk menggali hukum-hukum yang bersumber dari nash syara' (al-Qur'an dan/ atau al-Sunnah). Pendekatan kebahasaan digunakan selain bertujuan untuk menetapkan/ mengeluarkan hukum zakat (*istinbâth al-ahkâm*) dari sumbernya (*mashâdir al-ahkâm al-syar'iyah*), juga untuk mengetahui *maqâshid asy-syarî'ah* dari nash-nash itu sendiri.⁷ Tujuan syariat tidak mungkin diketahui kecuali melalui pendekatan kebahasaan itu sendiri untuk mengungkap hikmah/ makna hakiki yang ada pada nash-nash syariat. Kedua pendekatan inilah yang sering digunakan para ulama untuk melakukan *istinbath* hukum baik yang terkait dengan konstruksi *fiqh* maupun fatwa.

Hukum pendistribusian zakat dapat digali dari nash-nash yang terkait dengan pembagian zakat, baik secara kebahasaan maupun *maqâshid syarî'ah*. Sebelum ditutunkannya ayat, Rasulullah sendiri enggan untuk memberikan zakat meskipun ada orang yang memintanya. Dalam suatu riwayat, Ziyâd Ibn Hârîts r.a berkata: "Saya telah mendatangi Rasulullah dan berbaikat kepadanya." Kemudian datang seorang laki-laki yang berkata: "Berikan kepada saya sebagian dari shadaqah." Maka berkata Rasulullah:

إن الله لم يرض بحكمي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها. فحرأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء

أعصى⁸

Sesungguhnya Allah belum meridhai dengan hukum nabi maupun lainnya terkait shadaqah hingga Dia menetapkan hukumnya. Kemudian setelah Dia

Wahaf al-Qahtâni, *Masharif al-Zakat fi al-Islâmi*, (Riyâd: Muasasah al-Jarîsî, 1431H), hlm. 4

Maqâshid syarî'ah merupakan nama dari cabang ilmu *syarî'ah Islâmiyah*. *Maqâshid syarî'ah* tersusun dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* (مقاصد) bentuk jamak dari *maksud* (مقصود) merupakan bentuk masdar dari kata kerja (قصد يقصد قصدًا و مقصدًا). Lihat, Muhtar al-Khadimi, 'Ilm al- Maqâshid al-Syar'iyah, (Riyad: Maktabah Abikan, 1421H), hlm. 13.

Sunan Abu Dâwud Nomor 1630 dalam *Tafsir al-Qur'ân al-'Adhîm*, (Riyâd: Dâr al-Thayyibah, 1418H), (V) 165; Yûsuf al-Qardâwî, *Fiqh al-Zakât*, (Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1983), hlm. 542

membaginya delapan bagian, karenanya jika kamu termasuk bagian itu, maka aku akan memberimu.

Penjelasan hadits tersebut menunjukkan bahwa pembagian zakat harus mendasarkan pada syariat. Syariat telah menegaskan bahwa pendistribusian zakat hanya diperuntukkan kepada delapan asnaf (*mustahiqin*) sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ
فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu>allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS.At-taubah[9]: 60).

Ibnu Katsir menjelaskan dalam tafsirnya bahwa manakala Allah menyebutkan penolakan orang-orang munafik jahiliyah dan pencelaannya kepada Rasulullah dalam masalah pembagian sedekah. Allah menjelaskan menetapkan pembagian dan menerangkan hukumnya serta yang menangani masalah ini adalah Allah sendiri. Dia tidak mewakilkan pembagiannya kepada seorang pun, kemudian Dia-lah yang membagi shadaqah tersebut kepada golongan-golongan yang tersebut.⁸ Artinya, ketika Allah sendiri yang membagi shadaqah, maka pembagian shadaqah yang dilakukan oleh manusia haruslah sesuai dengan kehendakNya. Jika amil (baik sendiri maupun melalui badan/ lembaga amil zakat) mampu menjalankan amanah Allah dalam mendistribusikan zakat, maka keridhaanNya akan menghampirinya. Begitupula sebaliknya, apabila amil mengkhianati amanah Allah tentu yang menghampiri dirinya adalah kemurkaanNya.

Kata *innamâ* ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut tidak untuk yang lainnya.⁹ Menurut al-Qahtâni, tidak boleh mentasharufkan zakat kepada selain yang telah ditentukan. Mentasharufkan zakat untuk membangun masjid, memperbaiki jalan, membeli kafan mayit, dan lain-lain merupakan perbuatan yang buruk karena Allah telah mengkhususkan untuk delapan asnaf melalui lafadz *innamâ*. Maksud lafadz tersebut adalah untuk pembatasan ketetapan yang telah disebutkan dan menafikkan selainnya. Imam Ibn Qadâmah menyatakan: “Kami tidak mengetahui perbedaan pendapat diantara ahlu ilmi yang melarang penyaluran zakat kepada selain ansaf, kecuali pendapat dari Anas dan

8 Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, (Riyâd: Dâr al-Thiyibah, 1418H), IV/ 165

9 Lihat *Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah*

Hasan.¹⁰ Maksudnya adalah bahwa para ahli ilmu sepakat melarang penyaluran zakat kepada selain delapan asnaf, kecuali hanya sedikit yang membolehkan.

Pendistribusian khusus kepada delapan asnaf merupakan bentuk perintah yang harus dijalankan. Bentuk perintah itu bisa dilihat dari lafadz *faridhatan mina Allāh* yang berarti ketentuan dari Allah. Karena pembagian tersebut sudah menjadi ketentuan dari Allah, maka keberadaana harus diikuti. Disamping itu, pembagian menjadi delapan asnaf merupakan bentuk pemberitahuan Allah kepada hambaNya (*mukhāthab*) yang sebelumnya barangkali tidak tahu. *Maqāshid asy-syari'ah* dari penetapan delapan asnaf tersebut adalah agar pendistribusian zakat tidak salah sasaran.

Namun ada perbedaan pendapat dari kalangan ulama terkait delapan asnaf, apakah pembagian kepada semuanya atau bagian yang memungkinkan saja? Dalam hal ini ada dua pendapat, pertama wajib mendistribusikan kepada semua asnaf yaitu dari pendapat Syafi'i berserta jamaah. Kedua tidak wajib mendistribusikan ke semua asnaf tetapi bisa salah satu darinya. Pendapat ini adalah pendapat Imam Malik dan beberapa orang dari kaum Salaf dan khalaf, diantaranya Umar, Hudzaifah, Ibnu 'Abbas, Abul 'Aliyah, Sa'id bin Zubair dan Maimun bin Mihran. Berkata Ibnu Jarir, ini adalah pendapat kebanyakan ahli ilmu. Berdasarkan pendapat ini, maka tujuan penyebutan golongan-golongan tersebut dalam ayat ini adalah untuk menerangkan tentang golongan yang berhak menerima zakat bukan untuk menjelaskan kewajiban membagikannya kepada semua golongan tersebut.¹¹ Karena itu mendistribusikan zakat kepada salah satu asnaf hukumnya diperbolehkan.

Kata *shadaqāt* adalah zakat yang bersifat wajib dengan alasan bahwa *shadaqāt* diinginkan oleh semua manusia. Sesungguhnya *shadaqāt* diperuntukkan bagi semua yang telah disebutkan (dalam al-Taubah[9]:60).¹² Allah telah mengkhususkan sebagian manusia dengan harta sebagai bentuk kenikmatan dariNya dan menjadikan mereka syukur dengan berbagi kepada orang yang tidak mempunya.¹³

Pada ayat di atas, Allah menggambarkan hak kepemilikan mereka dengan *lam* yang berfungsi sebagai *lam tamlik* (*lam* yang berarti memiliki).¹⁴ Menurut Razaq al-'Aini dalam kitab: *Masharif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al-Kitāb wa al-Sunnah*, sebagaimana dikutip oleh Moh. Thoriquddin dinyatakan bahwa huruf *lām* dalam surat al-Taubah[9]:60 tersebut bukanlah *li al-tamlik* akan tetapi *li ajl* maksudnya

10 Wahaf al-Qahtāni, *Masharif al-Zakat fi al-Islāmi*, hlm. 5

11 *Ibid.*

12 Abdurrahman bin Nāshir al-Sa'di, *Tafsir al-Karīm al-Rahman fi Tafsir Kalāmi al-Mānan*, (Saudi Arabia: Dar al-Salām, 1422H), hlm. 389

13 Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Muasasah al-Risālah, 1427H), X/ 244

14 Lihat pendapat Muhammad bin Salih al-Uthaimin dalam disertasi Molt. Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqāshid Syari'ah* Ibnu 'Ashur, (Surabaya: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014), hlm. 223

li *ajli al-masraf* (untuk penyaluran).¹⁵ Dengan demikian, konsep *mustahiq* yang semula hanya bermakna orang yang berhak menerima dan memiliki harta zakat secara penuh semakin kaya makna yaitu orang yang berhak menerima pinjaman dari dana zakat dan mengembalikannya bukan memiliki sepenuhnya.¹⁶

Menurut penulis, yang dimaksud kepemilikan (*tamlik*) dari pemberian dana zakat adalah kepemilikan sempurna. Kepemilikan dikatakan sempurna ketika terjadi penyatuan antara benda dan manfaatnya.¹⁷ Dengan kepemilikan sempurna tersebut, *mustahiq* dapat mentasyarufkan dana zakat yang diperoleh sesuai kebutuhannya baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Namun dengan hak kepemilikan sempurna itu, terkadang dana zakat yang telah didistribusikan justru tidak efektif. Ketidak efektifan itu bisa terjadi karena dana zakat yang diberikan hanya terbatas atau karena faktor penggunaan yang belum menyentuh usaha produktif. Apapun yang menjadi penyebab ketidakefektifan dana zakat harus segera diketahui dan dicarikan solusinya, sehingga pemberdayaan *mustahiq* tidak mengalami kegagalan.

Pendistribusian Zakat Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Meskipun (QS.At-taubah[9]: 60) telah mewajibkan pendistribusian zakat kepada delapan asnaf (*mustahiqin*), namun cara pendistribusiannya tidak dinyatakan secara terperinci dalam ayat tersebut. Tidak adanya ketentuan khusus terkait cara pendistribusian zakat, berarti telah membuka peluang "ijtihad" bagi pengelola zakat untuk melakukan inovasi-inovasi pendistribusian zakat secara efektif untuk kemaslahatan *mustahiq*. Menurut penulis, pendistribusian zakat secara umum terbagi menjadi dua, yaitu (1) Pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan (2) Pendistribusian zakat secara produktif untuk memberikan pemberdayaan ekonomi.

Pendistribusian zakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif *mustahiq* harus diprioritaskan terlebih dahulu karena menyangkut kebutuhan pokok. Kenyataan bahwa banyak *mustahiq* yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pokok secara layak misalnya makan/ minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. *Mustahiq* yang mengalami kesulitan tersebut harus segera dibantu agar mereka segera terbebaskan dari penderitaan yang menghimpit kehidupan mereka. Kebahagiaan *mustahiq* adalah do'a bagi para *muzakki* yang telah menunaikan zakatnya. Untuk mengetahui keberadaan *mustahiq*, diperlukan survei ke masyarakat.

Di tengah kehidupan masyarakat yang kompleks, tentu masih ada *mustahiq* yang belum tersentuh dana zakat secara memadai. Adapun sebab para *mustahiq* tidak mendapatkan dana zakat ada dua kemungkinan, yaitu: (1) Keterbatasan dana zakat

¹⁵ *Ibid.* hlm.224

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ali Khafifi, *al-Ahkām al-Mu'āmalāt al-Syar'iyyat*, (Kairo: Dār al-Fikri al-'Arabi, 1429H), hlm. 60

karena kurangnya kesadaran *muzakki*; dan (2) Karena faktor kelalaian pengelola zakat (Badan/ Lembaga Amil Zakat), sehingga mereka luput dari penjangkaran calon *mustahiq*. Kedua faktor tersebut tentu bisa dihindari apabila penghimpunan dan pendistribusian zakat dikelola oleh lembaga yang memiliki kemauan untuk menjadi lebih profesional.

Pendistribusian zakat yang bersifat produktif adalah dimaksudkan untuk memberdayakan ekonomi *mustahiq*, sehingga diharapkan ke depan mereka mampu mandiri bahkan menjadi *muzakki-muzakki* baru. Dikatakan produktif karena penyaluran dana ke *mustahiq* tersebut digunakan khusus untuk modal usaha yang memungkinkan mendatangkan keuntungan. Menurut penulis, pendistribusian zakat secara produktif hanya bisa dilakukan setelah kebutuhan pokok para *mustahiq* terpenuhi. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dinyatakan:

Pasal 27

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- (2) **Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.**
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri¹⁸.

Berdasarkan pasal tersebut dapat diketahui bahwa pendayagunaan zakat produktif bisa dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*, pendistribusian melalui pendekatan konsumtif perlu dilakukan. Karena itu untuk dapat mendistribusikan zakat secara produktif syarat-syarat yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan adalah: (1) Apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi; (2) Memenuhi ketentuan syariah; (3) Menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk mustahik; dan (4) *Mustahiq* berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat.¹⁹ Disamping syarat-syarat tersbut, pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha produktif dapat dilakukan paling sedikit memenuhi ketentuan: (a) Penerima manfaat merupakan perorangan atau kelompok yang memenuhi kriteria *mustahiq*; dan (b) Mendapat pendampingan dari amil zakat yang berada di wilayah domisili *mustahiq*.²⁰

Distribusi zakat secara produktif adalah terkait dengan pendanaan usaha *mustahiq*. Menurut penulis, pendistribusian zakat produktif yang paling utama adalah dengan memberikan dana zakat kepada *mustahiq* untuk merintis usaha

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)

¹⁹ Pasal 33 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif

²⁰ *Ibid.*, Pasal 34

atau mengembangkan usaha yang telah mereka miliki. Maksud memberikan disini adalah *li tamlik*, yaitu memiliki harta zakat yang menjadi haknya termasuk manfaatnya. Barangkali dalam kondisi khusus, pengelola zakat dapat memberikan manfaat (*li manfa'ah*) dana zakat kepada *mustahiq* melalui akad tertentu yang sifatnya timbal balik (*muwā'adah*). Pendekatan yang hanya sebatas manfaat (*li manfa'ah*) sesungguhnya merupakan tindak lanjut dari konsep *li aji al-masraf* (untuk penyaluran).

Jika pendekatan *li manfa'ah* dimungkinkan dalam pendistribusian zakat, maka penulis membaginya menjadi dua, pendistribusian manfaat dana zakat melalui akad yang bersifat *tabarru'* seperti hutang piutang (*al-qardh*, *al-rahn*, *al-hiwalah*, dan lain-lain) atau melalui akad yang sifatnya *tijarah* seperti akad yang berbasis jual beli (*murabahah*, *salam/ istishna'*), bagi hasil (*mudharabah*, *syirkah*), sewa menyewa (*al-ijarah/ IMBT*). Kelebihan dari *li manfa'at* adalah bahwa dana zakat akan tetap utuh bahkan berkembang, sedangkan kemanfaatannya dapat dirasakan oleh *mustahiq*. Apabila dana zakat memberikan kemanfaatan/ kemaslahatan bagi *mustahiq*, maka berbagai model pendistribusian zakat tersebut sejalan dengan *maqāshid syari'ah*.

Disamping memberikan kemaslahatan, pendistribusian zakat melalui pendekatan *li manfa'at* (*ghairi li tamlik*) juga memiliki kelemahan. Jika pendekatan ini menjadi dominan dalam pendistribusian zakat, dikhawatirkan dana zakat akan menumpuk di pengelola zakat. Tumpukan dana zakat itu bisa berasal dari pembayaran zakat para *muzakki* dan/ atau dari dana zakat sebelumnya yang sedang "disalurkan" ke *mustahiq*. Karena itu agar dana zakat tidak menjadi beban pengelola zakat (Badan/ Lembaga Amil Zakat), pendistribusian secara proporsional merupakan keharusan. Maksud proporsional adalah adanya program pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif dan ada yang produktif. Pendistribusian zakat secara produktif ada yang diberikan (*li tamlik*) dan ada yang melalui akad tertentu baik yang bersifat *tabarru'* maupun *tijarah*. Diversifikasi program pendistribusian zakat tersebut, selain harus memperhatikan nash-nash syariat dari aspek kebahasaan, juga memperhatikan *maqāshid asy-syari'ah* itu sendiri.

Kesimpulan

Untuk mendapatkan kepercayaan *muzakki*, Badan/ Lembaga Amil Zakat harus memiliki program pendistribusian zakat secara baik. Untuk menyusun program pendistribusian zakat secara baik, diperlukan panduan yang termuat dalam *fiqh* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengimplementasikan program pendistribusian zakat, pengelola zakat perlu melakukan penjaringan bagi calon *mustahiq*. Daftar calon *mustahiq* yang telah terjaring, kemudian diklasifikasi untuk menentukan model pendistribusian apakah dengan cara konsumtif atau produktif.

Mustahiq yang kebutuhan pokoknya telah terpenuhi melalui pendistribusian zakat secara konsumtif, dapat diberi dana zakat yang bersifat produktif untuk dijadikan sebagai modal usaha yang mendatangkan keuntungan. Meskipun setiap pendistribusian zakat selalu memberikan manfaat bagi *mustahiq*, namun keberhasilan pengelolaan zakat sangat ditentukan sejauh mana efek pendistribusian itu terhadap perubahan keadaan seseorang dari status *mustahiq* menjadi *muzakki*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitâb al-Fiqh 'ala al-Mazâhib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyah, 1424H
- Al-Qahthâni, Wahaf, *Masharîf al-Zakat fî al-Islâmî*, Riyâdh: Muasasah al-Jarîsî, 1431H
- Al-Khadimi, Muhtar, *Ilm al-Maqâshid al-Syar'iyah*, Riyâdh: Maktabah Abikan, 1421H
- Al-Qardâwî, Yûsuf, *Fiqh al-Zakât*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1983M
- Al-Qurtubî, *Al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Beirut: Muasasah al-Risâlah, 1427H
- Al-Sa'di, Abdurrahman bin Nâshir, *Taisîr al-Karîm al-Rahman fî Tafsîr Kalâmi al-Mânan*, Tp: Dar al-Salâm, 1422H
- Katsir, Ibnu, *Tafsîr al-Qur'ân al-'Adhîm*, Riyâdh: Dâr al-Thayibah, 1418H
- Khafifi, Ali, *al-Ahkâm al-Mu'âmalât al-Syar'iyat*, Kairo: Dâr al-Fikri al-'Arabî, 1429H
- Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Kairo: Fatul 'Ilam Al-Arabi, t.t
- Toriquddin, Moh., *Pengelolaan Zakat Produktif di El-Zawa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Perspektif Maqâshid Syar'iah Ibnu 'Ashur*, Surabaya: Program Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115)
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif